

## STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PENGUATAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN<sup>1</sup>

Oleh: *Drs. H. Mukhlis Latif, M.Si*<sup>2</sup>

### A. Pendahuluan

Saya mencoba memulai tulisan ini dengan mengutip salah satu stemen seorang profesor Sosiologi Pedesaan, sebagai berikut:

*Di tengah ketakterprediksian konflik dan kekerasan di balik fenomena kompleksitas dan kekacauan yang dideterminasi oleh globalisasi dan lokalisasi saat ini, diperlukan kontribusi berbagai macam pengetahuan untuk dijadikan acuan bagi individu dalam berdialektika dengan struktur sosial guna mewujudkan tatanan yang berkualitas baik. Salah satu pengetahuan yang potensil untuk itu adalah kearifan lokal, yakni hikmah kebijaksanaan yang terkristalkan dari pengalaman hidup secara jangka panjang pada sistem sosial-budaya masing-masing, yang menjelma dalam bentuk peribahasa, pesan-pesan, prosa/puisi, dan lainnya. Hampir setiap sistem sosial lokal di Indonesia memiliki butir-butir kearifan lokal yang pada era sekarang dapat difasilitasi untuk berkontribusi dalam pengelolaan konflik berkekerasan dan tindakan kekerasan. Untuk itu, (1) dibutuhkan perayaan dan panggung agar butir-butir kearifan lokal dapat menjadi sumber inspirasi bagi terlahirkannya budi baik dalam tatanan; (2) memperkuat dan meluaskan jangkau-ikatan dari kohesivitas sosial masyarakat melalui fasilitasi atas berfungsinya unsur modal sosial seperti kepatuhan atas norma kebersamaan, saling-percaya, hubungan resiprositas, serta organisasi dan jaringan, baik dalam ikatan keluarga, kerabat, kelompok dan golongan (bounding social capital) maupun lintas entitas kolektiva tersebut (bridging social capital); (3) memperluas ruang apresiasi atas praktek penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal pada berbagai entitas adat/lokalitas di tanah-air<sup>3</sup>*

*Selain itu, penguatan organisasi sosial keagamaan memiliki peran penting dalam berkontribusi terhadap penyelesaian konflik horizontal dalam masyarakat. Jika hal ini ditarik dalam konteks keindonesiaan, maka organisasi keagamaan terbesar yang dapat memegang kendali adalah NU dan Muhammadiyah.<sup>4</sup>*

---

<sup>1</sup> Makalah ini dipresentasikan pada *PENTALOKA* pada tanggal 15-18 Maret 2012 di Banten

<sup>2</sup> H. Mukhlis Latif, M.Si (*Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulbar*)

<sup>3</sup> Darmawan Salman seorang Profesor Sosiologi Pedesaan pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin

<sup>4</sup> Penulis

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa konflik merupakan proses sosial yang pasti akan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dinamis, karena Konflik terjadi karena adanya interaksi sosial antara individu maupun kelompok dengan kepentingan masing-masing. Hal tersebut kemudian melahirkan perbedaan atau kesalahpahaman antara individu dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam konflik pasti ada perselisihan dan pertentangan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa dialami oleh siapa saja dalam berbagai lapisan sosial masyarakat. Konflik bisa dimulai dari keluarga, masyarakat sekitar, nasional, dan global. Jenis-jenis konflik pun dapat beragam.

Dengan demikian, maka konflik adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan sosial, terkadang ada bentuk konflik yang mengarah kepada suatu perkembangan (konstruktif). Dan ada pula konflik yang mengarah kepada pengrusakan dan kekerasan (dekonstruktif), inilah yang akan menjadi pokok bahasan pada tulisan ini, yaitu suatu upaya penyelesaian konflik dengan berbagai metode, termasuk penyelesaian konflik dengan pendekatan kearifan lokal dan penguatan organisasi sosial keagamaan.

Oleh karena itu, di dalam masyarakat yang majemuk perlu waspada dalam bertindak, terutama yang berhubungan dengan masalah SARA (Suku, Agama, dan Ras) yang dapat menimbulkan konflik sehingga dapat membahayakan stabilitas nasional. Adanya dominasi dalam bidang-bidang kehidupan seperti ekonomi ataupun pemerintahan oleh suatu etnis tertentu, dapat memancing perasaan tidak senang etnis lain sehingga dapat menimbulkan benih-benih konflik dalam masyarakat.

### **B. Pengertian Konflik**

Konflik berasal dari kata *Conligere* (bahasa latin) yang berarti menyerang bersama-sama Menurut Mitchell (1981), konflik adalah sebuah situasi dimana dua atau lebih orang saling mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya tetapi hanya salah satu yang berhasil mencapainya.

Menurut James A. Schellenberg (1966), konflik adalah situasi dimana Individu atau kelompok yang lain dalam rangka merebut sesuatu yang dikehendakii berdasarkan pada persaingan kepentingan-kepentingan karena perbedaan identitas atau sikap. Menurut Louis Kiesberg (1988) Konflik sosial adalah fenomena umum yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Robert M.Z. Lawang, mengatakan bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, yang tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas.

Kartono, berpendapat bahwa konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuf ase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Konflik yang terjadi antar individu, misalnya konflik di antara sesama teman di sekolah. Konflik antara individu dengan kelompok, misalnya konflik antara seorang majikan dan buruhnya; atau konflik

antara kelompok dan kelompok, misalnya para pedagang kaki lima dengan para petugas kebersihan. Bahkan, konflik dapat melibatkan antarnegara, seperti konflik antara Irak dan Amerika.

Peter Harris dan Ben Relly (1998), berpendapat bahwa sifat konflik yang tajam di dunia telah berubah dalam satu dekade terakhir, baik dalam inti permasalahan maupun dalam bentuk pengeksplorasinya. Salah satu perubahan yang paling dramatis adalah pengeseran dari konflik antarnegara yang tradisional (perang antarnegara berdaulat) menuju konflik dalam negara. Konflik-konflik yang paling kejam sepanjang abad ke-20 adalah konflik antarnegara. Akan tetapi, pada tahun 1990-an hampir semua konflik besar di dunia terjadi dalam negara atau konflik internal, misalnya perang saudara, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis dengan kekerasan, dan peperangan domestik lainnya.

Pandangan lain bahwa konflik adalah sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya di antara dua kelompok, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Konflik berasal dari kata kerja bahasa latin yaitu *configure* yang berarti saling memukul. Secara Sosiologis konflik diartikan sebagai proses social antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Jika dilihat definisi secara sosiologis, konflik senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat sehingga konflik tidak dapat dihilangkan tetapi hanya dapat diminimalkan.

Selanjutnya bahwa konflik dapat diidentifikasi secara umum bahwa jenis konflik sosial yang terjadi khususnya di Indonesia terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Konflik vertikal, contohnya konflik negara versus warga, buruh versus majikan.
  - b. Konflik horizontal, contohnya konflik antarsuku, antaragama, dan antarmasyarakat.
- Konflik-konflik tersebut bisa berlatar belakang ekonomi, politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya.

Apabila kita memperhatikan fenomena kehidupan sehari-hari, baik yang kita alami sendiri maupun melalui berbagai sumber informasi di media massa (seperti surat kabar, majalah, radio, dan TV) tentang konflik, diperkirakan ada sejumlah pola konflik yang perlu diwaspadai, yaitu:

- a. Konflik internal di dalam suatu masyarakat lokal;
- b. Konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah;
- c. Konflik masyarakat antardaerah;
- d. Konflik antara dua atau lebih pemerintah daerah;
- e. Konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara;
- f. Konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- g. Konflik antarelite di pemerintah pusat yang berimbas pada Konflik masyarakat di tingkat lokal.

### C. Faktor-faktor Penyebab Konflik

Penyebab terjadinya konflik dikelompokkan dalam dua kategori besar:

1. Karakteristik Individual
  - a. Nilai sikap dan Kepercayaan (*Values, Attitude, and Beliefs*) atau Perasaan kita tentang apa yang benar dan apa yang salah, untuk bertindak positif maupun negatif terhadap suatu kejadian, dapat dengan mudah menjadi sumber terjadinya konflik.
  - b. Kebutuhan dan Kepribadian (*Needs and Personality*). Konflik muncul karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan kepribadian setiap orang, yang bahkan dapat berlanjut kepada perseteruan antar pribadi. Sering muncul kasus di mana orang-orang yang memiliki kebutuhan kekuasaan dan prestasi yang tinggi cenderung untuk tidak begitu suka bekerjasama dengan orang lain.
  - c. Perbedaan Persepsi (*Perceptual Differences*) Persepsi dan penilaian dapat menjadi penyebab terjadinya konflik. Misalnya saja, jika kita menganggap seseorang sebagai ancaman, kita dapat berubah menjadi defensif terhadap orang tersebut.

#### 2. Faktor Situasi

- a. Kesempatan dan Kebutuhan Berinteraksi (*Opportunity and Need to Interact*). Kemungkinan terjadinya konflik akan sangat kecil jika orang-orang terpisah secara fisik dan jarang berinteraksi. Sejalan dengan meningkatnya asosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat, semakin mengikat pula terjadinya konflik. Dalam bentuk interaksi yang aktif dan kompleks seperti pengambilan keputusan bersama (*joint decision-making*), potensi terjadinya konflik bahkan semakin meningkat.
- b. Ketergantungan satu pihak kepada Pihak lain (*Dependency of One Party to Another*)  
 Dalam kasus seperti ini, jika satu pihak gagal melaksanakan tugasnya, pihak yang lain juga terkena akibatnya, sehingga konflik lebih sering muncul.
- c. Perbedaan Status (*Status Differences*) Apabila seseorang bertindak dalam cara-cara yang "arogan" dengan statusnya, konflik dapat muncul. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan, pihak yang berada dalam level atas organisasi merasa tidak perlu meminta pendapat para anggota tim yang ada

Sementara pandangan lain mengatakan bahwa perbedaan individu yang didasari oleh perbedaan pendirian dan perbedaan perasaan. Setiap manusia memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda, sehingga dalam menilai sesuatu tentu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Misalnya masyarakat menilai kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM karena harga bahan mentah naik. Tentu setiap masyarakat akan menilai dengan pemikirannya masing-masing yang mungkin secara umum terbagi menjadi kelompok yang pro dan kontra. Dengan demikian, berikut adalah faktor-faktor penyebab konflik:

1. Perbedaan kebudayaan  
 Perbedaan kebudayaan membentuk pribadi yang berbeda, misalnya orang Jawa dengan orang Papua yang memiliki budaya berbeda, jelas akan membedakan pola pikir dan kepribadian yang berbeda pula. Jika hal ini tak ada suatu hal yang dapat mempersatukan, akan berakibat timbulnya konflik.

## 2. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok

Manusia merupakan makhluk yang unik karena satu dengan yang lain relative berbeda. Berbeda pendirian, pemikiran, perilaku, kebiasaan, dsb. Dari perbedaan itu tentu timbul perbedaan kepentingan yang latar belakangnya juga berbeda. Misalnya mengenai masalah pemanfaatan hutan. Para pecinta alam menganggap hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup manusia dan habitat dari flora dan fauna. Sedangkan bagi para petani hutan dapat menghambat tumbuhnya jumlah areal persawahan atau perkebunan. Bagi para pengusaha kayu tentu ini menjadi komoditas yang menguntungkan. Dari kasus ini ada pihak – pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, sehingga dapat berakibat timbulnya konflik.

### 3. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat

Perubahan merupakan suatu hal yang wajar di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi perubahan yang sangat cepat akan memicu timbulnya konflik. Misalnya masyarakat pedesaan yang secara umum matapencariannya bertani yang hidupnya bergotong-royong dengan jadwal waktu yang relative tidak mengikat, kemudian tumbuh suatu industry dengan waktu yang relative cepat dengan kebiasaan cenderung individualis, disiplin kerja dan waktu kerja ditentukan, yang secara umum mengubah nilai-nilai masyarakat desa tadi, tentu akan menimbulkan konflik berupa penolakan diadakannya industry di wilayah itu.

## D. Teori Penyelesaian Konflik Secara Universal

Teori resolusi konflik menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Resolusi konflik juga berupaya menciptakan suatu mekanisme penyelesaian konflik secara komprehensif dalam tiap-tiap tahap eskalasi konflik. Pada intinya, teori resolusi konflik mengedepankan prinsip-prinsip bahwa:

1. Konflik tidak dapat dipandang sebagai suatu fenomena politik-militeristik namun juga harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial,
2. Konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear, sangat bergantung pada dinamika lingkungan konflik,
3. Sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat melainkan harus dilihat sebagai fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor,
4. Resolusi konflik hanya diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

Upaya menciptakan institusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik dilakukan dengan dua cara;

- 1) mengembangkan prosedur resolusi konflik (*conflict prevention, conflict management, conflict resolution and conflict prevention*) yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengembangkan proses fasilitasi, merancang strategi keterlibatan pihak ketiga, memulai proses perubahan struktural yang diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik, dan
- 2) memulai perubahan struktural dengan mengidentifikasi potensi kekerasan struktural (*structural violence*) yang terdapat dalam sistem dan kemudian dapat dirancang

solusi-solusi yang mungkin diterapkan untuk menghilangkannya. Proses merancang solusi tersebut akan memaksa negara untuk secara kolektif mengeksplorasi cara-cara non-kekerasan untuk menyelesaikan sengketa dan menempatkan instrumen perang sebagai alternatif terakhir.

Strategi penyelesaian konflik oleh seorang pemimpin, dikategorikan dalam dua dimensi ialah kerjasama/tidak kerjasama dan tegas/tidak tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut, maka ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik ialah:

1. Kompetisi  
Penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkannya atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah *winn-lose orientation*.
2. Akomodasi  
Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian.
3. Sharing  
Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan.
4. Kolaborasi  
Bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskankan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem (*problem-solving approach*) yang memerlukan integrasi dari kedua pihak.
5. Penghindaran  
Menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.

#### **E. Penyelesaian Konflik berbasis kearifan Lokal**

Masyarakat dan konflik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bersifat alamiah. Menurut Alo Liliweri, bahwa konflik itu normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi dan kerjasama antar manusia . Konflik mempunyai berbagai bentuk misalnya konflik antar pribadi, antar kelompok, konflik antar organisasi dan lain sebagainya. Konflik pada dasarnya memiliki beberapa unsur yaitu ada dua pihak yang terlibat, ada tujuan yang dijadikan sasaran, ada tindakan dan ada situasi yang melahhkan sebuah pertentangan.

Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan mengganggu kestabilan. Tetapi pada dasarnya konflik mempunyai sisi lain yang berdaya positif yaitu sebagai sebuah proses menuju perubahan. Sehingga konflik harus diakui keberadaannya, diolah, dimanajemen, dan diubah menjadi kekuatan untuk menuju perubahan yang baik.

Ada banyak pendekatan yang sering dilakukan untuk melakukan penyelesaian konflik, misalnya model penyelesaian berdasarkan *sumber konflik, model boulding, model posisi kepentingan dan kebutuhan, model intervensi pihak ketiga* dan banyak model yang lainnya . Dalam penyelesaian konflik biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan teori

universal dan mengadopsi dari luar, sehingga berakibat pada tidak munculnya penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perlangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat.

Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau setting dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Ada bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering diucapkan yaitu kearifan lokal (*local wisdom*). Dalam masyarakat majemuk seperti Bangsa Indonesia terdapat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sangat potensial dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan damai (*peace*).

Kearifan lokal (*local genius/local wisdom*) dapat menjelma sebagai 'substansi ucapan' maupun sebagai 'praktek kehidupan'. Sebagai 'substansi ucapan', kearifan lokal menjelma sebagai pernyataan hikmah kebijaksanaan dalam bentuk nyanjian, peribahasa, sasanti, petuah, semboyan dan pesan-pesan yang tersajikan secara prosais ataupun puitis. Sebagai 'praktek kehidupan', kearifan lokal menjelma dalam bentuk perilaku hidup yang penuh hikmah kebijaksanaan sebagai hasil preskripsi dari substansi nyanjian, peribahasa, sasanti, petuah, semboyan dan pesan-pesan prosais maupun puitis. Kualitas tatanan tentunya akan lebih dikontribusi tinggi oleh kearifan lokal yang menjelma tidak hanya sebagai 'substansi ucapan baik' tetapi juga sebagai 'praktek kehidupan baik'. Penjelmaan kearifan lokal sebatas 'substansi ucapan baik' terutama terkait dengan ucapan denotatif dan konotatif, sementara penjelmaan kearifan lokal sebagai 'praktek kehidupan baik' terutama terkait dengan ucapan preskriptif dan transformatif; namun ucapan preskriptif dan transformatif menempatkan ucapan denotatif dan konotatif sebagai prakondisinya.

Kearifan lokal dan identitas tatanan terkait erat satu sama lain melalui dua basis keunikan yakni 'bahasa yang digunakan' dan 'batas lingkungan sosial' dari keberlakuan 'substansi ucapan baik' dan 'praktek kehidupan baik' itu. Ucapan baik Melayu seperti 'berat sama dijinjing, ringan sama dipikul', 'bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian', 'kalah jadi abu, menang jadi arang', 'guru kencing berdiri, murid kencing berlari', 'rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya', akan menemukan konteks manifestasinya pada lingkungan sosial yang paham bahasa Melayu, dimana Bahasa Melayu kemudian menjadi substrat Bahasa Indonesia, sehingga kelokalmnya bermakna keIndonesiaan.

Berikut ini adalah telisik atas salah satu bentuk kearifan lokal Mandar dari sekian banyak kearifan local yang ada di tana Mandar. Mandar memiliki pesan-pesan atau wasiat orang-orang tua yang disampaikan turun-temurun secara lisan dan literer yang disebut "*kalinda'da*". *Kalinda'da* tersebut sebagai bentuk pengekspresian nilai budaya masyarakatnya, mengemban fungsi-fungsi pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai budaya. Berikut ini adalah kutipan "*Kalinda'da*" yang diyakini oleh orang-orang Mandar mengandung pesan moral kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan manusia.

Selain "*kalinda'da*", ada juga satu keyakinan orang-orang Mandar bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah memberi makna jika tidak melakukan kebaikan, sehingga dalam kehidupan orang-orang Mandar, masing-masing individu menuju dan mencari suatu nilai kemanusiaan sebagai bekal untuk kembali kepada sang Khalik yaitu suatu status atau predikat manusia yang paripurna (*insan kamil*) yang disebut dengan "*Tau Malaqbi*".

Makna dan kandungan dari kedua bentuk kearifan local ini, akan diuraikan sebagaimana berikut:

### 1. *Kalinda'da*

Pada prinsipnya *Kalinda'da* secara garis besar terbagi atas empat aspek kehidupan manusia yakni *Kalinda'da* tentang membangun masyarakat yang damai, *Kalinda'da* cinta, *Kalinda'da* etos kerja dan *Kalinda'da* agama dan tasawuf. Namun pada pembahasan ini, kita hanya menyinggung tentang *Kalinda'da* membangun masyarakat yang ideal (*masyarakat madani*) yang hubungannya dengan penyelesaian konflik berwawasan kearifan local. Berikut contoh *Kalinda'da*:

*Malilu sipakainga,*

*Ra'ba si patokkong*

*Mannus siorongngi*

*Di buttu di lappar*

*Andiangngi tau mala sisara' mallullu are*

Maknanya:

*Malilu sipakainga*, artinya bahwa manusia pada hakikat tidak luput dari kesalahan,

maka fungsi manusia lainnya adalah memberi nasehat kepada yang melakukan kesalahan.  
*Ra'ba si patokkong*, artinya bahwa jika ada orang lain atau masyarakat lain yang mendapat kesusahan, maka masyarakat lainnya harus membantu untuk keluar dari masalahnya tersebut.

*Mannus siorongngi*, artinya bahwa jika ada orang lain yang larut dalam keteringgalan, baik dari aspek pendidikan maupun ekonomi, maka kita harus memberi perhatian dan membantunya.

*Di buttu di lappar Andiangngi tau mala sisara' mallullu are*, artinya bahwa semua masyarakat baik yang dari pegunungan maupun pesisir, dengan latar belakang suku dan etnis maupun agama yang berbeda, namun pada hakikatnya kita bersaudara, maka kita tidak boleh saling bermusuhan hingga mengakibatkan perpecahan dan kekerasan antara kita.

Jika dianalisis secara seksama kandungan makna *kalinda'da* di atas, maka ditemukan pesan yang sangat sarat dengan pesan-pesan moral. Di antaranya yang bisa kita tangkap adalah *kalinda'da* tersebut mengajari kita tentang *solidaritas sosial* dan *kepekaan sosial* yang terjadi di sekitar, *perdamaian* dan *kedamaian masyarakat tanpa kekerasan*.

*Mesa kada dipotuo*

*Pantan kada dipomate*

Maknanya:

*Mesa kada dipotuo*, artinya *kalinda'da* ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam suatu masyarakat, harus ada komitmen bersama antara seluruh komponen masyarakat ke arah yang lebih baik, misalnya pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif serta lembaga yudikatif harus membangun komitmen tentang kebijakan yang pro rakyat. Demikian pula rakyat harus memiliki komitmen untuk mendukung terhadap kebijakan pemerintah.

*Pantan kada dipomate*, artinya bahwa jika komitmen yang telah dibangun, kemudian belum bisa dilaksanakan, maka itu merupakan tanggung jawab bersama untuk terus berupaya agar komitmen tersebut dapat tercapai, akan tetapi jika komitmen yang telah dibangun kemudian dhiyanati oleh salah satu komponen yang ada, maka ia harus mendapat sanksi yang tegas.

## 2. "Tau Malagbi"

Jika *kalina'da* di atas, penekanannya lebih pada pembangunan masyarakat ideal, maka kearifan lokal ini yakni "Tau Malagbi" lebih pada pembangunan kualitas individu. Hal ini sesuai dengan idealism agama yang mengatakan "jika kamu ingin baik, maka mulailah dari rimu".

"Tau Malagbi" sebagai salah satu kearifan local memiliki kriteria yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai predikat "Tau Malagbi", yang lebih pada sifat dan sikapnya. Kriteria yang dimaksud sebagai berikut:

*Pertama*, seseorang itu harus memiliki sifat jujur, sehingga senantiasa bermanfaat bagi orang lain, dan di cintai orang lain.

*Kedua*, seseorang itu harus memiliki etos kerja yang tinggi sehingga ia mampu secara finansial dan banyak membantu orang lain.

*Ketiga*, seseorang harus cerdas, atau memiliki pengetahuan tinggi, karena pengetahuanlah yang dapat merubah paradigma berpikir seseorang untuk berpikir ke arah yang lebih baik.

*Keempat*, seseorang itu harus memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap seluruh komunitas masyarakat tanpa melihat latar belakang ekonomi, golongan, kelompok, suku, etnis dan agama.

*Kelima*, seseorang itu harus memiliki sifat istigamah dalam beribadah sesuai keyakinannya masing-masing.

Dari kelima poin tersebut di atas, jika dimiliki seseorang, maka ia berhak menyandang predikat "Tau Malagbi". Dan jika sifat-sifat tersebut telah dimiliki suatu masyarakat, maka penulis yakin bahwa masyarakat akan jauh dari konflik horizontal maupun konflik vertical.

Dari makna "Tau Malagbi" tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang berhak menyandang gelar "Tau Malagbi" adalah orang yang terbaik.

Ucapan denotatif di atas melukiskan tentang siapa mereka, sebagai orang-orang yang memaknai hidup dalam sebuah nilai dari sifat-sifat terpuji seperti jujur, rendah hati dan melihat masyarakat lainnya sebagai bagian dari dirinya.

Pesan di atas adalah kriteria mereka tentang manusia yang baik, tentang syarat menjadi pemerintah (jujur), pemangku adat (teguh), guru (sabar) ataupun dukun (pasrah). Sedangkan lirik berikut adalah kearifan mereka tentang lingkungan hidup (Nasrum, 1994).

Atau kita telisik kearifan tentang pemerintah yang baik, dimana kriterianya dikaitkan dengan kelestarian lingkungan. Bahwa keberlanjutan kehidupan hanya terjamin oleh pemerintahan yang beretika lingkungan (Nasrum, 1994).

Itulah dua contoh kearifan lokal, contoh dari substansi 'ucapan baik', yang satu lahir dari rahim budaya Mandar, entitas besar di Sulawesi Barat; yang satu lahir dari rahim budaya komunitas Kondosapata Mamasa, Isinya tidak hanya berupa ucapan denotatif dan konotatif, tetapi didalamnya juga tersebar ucapan preskriptif dan transformatif.

Persoalannya, dalam era kompleksitas perubahan dan fantasmagoria informasi saat ini, 'ucapan baik' yang bersumber dari hikmah kebijaksanaan pengalaman hidup pada rahim budaya lokal; bercampur-berbaur dengan berbagai 'ucapan lain' dari rahim budaya lain, ia hanya menjadi satu dari berbagai pertimbangan yang terinternalisasi dan terobyektivasi dalam diri individu. Sehingga, toleransi aktor atas preskripsi strukturnya, tidak hanya dilandasi oleh pengetahuan dari konteks struktur lokal diimana ia hidup;

melainkan juga dipengaruhi oleh pengetahuan dari suprastruktur globalnya, menjadikannya tidak selalu 'berpraktek hidup' secara selaras dengan ucapan baik' lokalitasnya.

Konflik berkekerasan dan tindakan kekerasan adalah dua praktek kehidupan tidak baik yang menjadikan sebuah tatanan berkualitas rendah. Meskipun konflik dan persaingan merupakan unsur proses sosial yang niscaya hadir dalam interaksi sosial sebagaimana niscayanya kerjasama dan damai, tetapi konflik berkekerasan tetaplah praktek kehidupan tidak baik dalam tatanan. Coser (1964) memang menunjukkan sejumlah fungsi konflik bagi tatanan sosial, tetapi ketika konflik laten menjadi manifest tidak sekedar sebagai konflik bertujuan tetapi sebagai konflik berkekerasan (violent conflict), maka ia adalah proses sosial yang tidak sekedar mendisintegrasi tatanan sosial pada aras struktur tetapi membawa derita-sengsara pada aras individu. Dalam pendasaran seperti itulah konflik berkekerasan dan tindakan kekerasan itu sendiri merupakan ketidakbaikakan bagi tatanan.

Dalam pemikiran dan upaya dimaksud, semua sumber pengetahuan harus dioptimalkan sebagai basis acuan dalam bertindak, semua multipihak harus difasilitasi berkontribusi. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kearifan lokal sebagai hikmah kebijaksanaan dari pengetahuan berbasis pengalaman suatu masyarakat, memiliki potensi untuk berkontribusi bagi solusi konflik berkekerasan dan tindakan kekerasan. Dalam kerangka bagaimana kearifan lokal bisa berkontribusi untuk penyelesaian konflik berkekerasan dan tindakan kekerasan?

*Pertama*, artikulasi kearifan lokal sebagai penanam budi baik bagi individu/aktor. Bila hikmah kebijaksanaan yang menjadi isi kearifan lokal dapat menanamkan budi baik kepada warga lingkungan sosialnya; sementara menekan emosi, nafsu dan murka diri untuk toleran terhadap tindakan menyinggung, mengalihkan, menyakinkan dan menghinakan dari orang lain adalah budi baik; maka dorongan untuk konflik berkekerasan dan tindakan kekerasan dapat diredakan melalui penghayatan dan pengamalan atas ucapan denotatif, konotatif, preskriptif dan transformatif dari kearifan lokal. Dalam sejarah, peradaban manusia memang dikontribusi oleh penjaga-penjaga pengetahuan, sejak perpustakaan Alexandria hingga dunia maya internet sekarang (McNeely dan Wolverton, 2010).

Karena itu, jadikanlah butir-butir hikmah dari kearifan lokal sebagai wacana sosial, buatkan panggung untuk setiap lokalitas merayakan kearifan lokalnya, sehingga patria kita menjadi taman bagi bunga-bunga kearifan lokal yang berjalinan satu sama. Tayangan televisi, berita surat kabar, siaran radio, cerita sinetron, nyanyian lagu, wawancara tokoh, pesan face-book; fasilitasi LSM, pendampingan relawan, aplikasi pertanggung-jawaban sosial perusahaan; nasihat orang tua, kuliah profesor, KKN mahasiswa, muatan lokal sekolah, diskusi warung kopi; orasi tokoh politik, arahan calon kepala daerah kepada pendukungnya, rehat anggota DPR, perilaku ormas; serta program dan kegiatan pembangunannya pemerintah; eloknya ikut perayaan dan mengisi panggung tersebut.

*Kedua*, artikulasi kearifan lokal sebagai basis modal sosial untuk menegakkan kohesi sosial. Kearifan lokal adalah sumber norma, ia adalah pranata sosial yang kepatuhan kepadanya karena kerelaan. Ia adalah bagian dari unsur yang secara informal menjadikan anggota tatanan dapat mengkoordinasikan diri mewujudkan tujuan bersama, dan karena itu ia adalah bagian dari modal sosial (Fukuyama, 2002; Field, 2010). Ketika tujuan bersama itu tersepekat pada tingkat lokal, maka ia menguatkan kohesi sosial pada tingkat lokal; bila tujuan bersama itu bersesuai sama lain antar lintas lokal, maka ia menguatkan kohesi sosial

lintas lokal; bila tujuan bersama itu bersesuaian antara tingkat lokal dengan supra lokal, maka ia menguatkan kohesi sosial vertikal (Colletta dan Cullen, 2000; Fukuyama, 2002).

*Ketiga*, artikulasi kearifan lokal sebagai praktek teknis penyelesaian konflik dan kekerasan. Sejumlah tanaman lokal mengembangkan praktek teknis resolusi konflik dan kekerasan. Pada unit sangat kecil,

Pernyataan dan ilustrasi diatas menunjukkan bahwa potensi kearifan lokal sebagai solusi bagi penyelesaian konflik berkekerasan dapat memanifest dalam berbagai skenario. Tantangannya terletak pada bagaimana setiap kita memulai menjalankan langkah untuk berkontribusi pada perayaan ataupun penciptaan panggung kearifan lokal tersebut.

Walaupun demikian setiap penyelesaian konflik mempunyai berbagai kelebihan dan juga kekurangan. Begitu juga penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal mempunyai berbagai kelebihan dan juga kekurangan, tetapi bisa sangat relevan digunakan pada masyarakat yang mempunyai karakter komunal.

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam penyelesaian konflik sangat tepat apalagi dengan kondisi sosiokultural seperti bangsa Indonesia yang pluralistik. Kondisi ini dikarenakan kearifan lokal sudah membudaya dalam masyarakat, telah mengakar melalui proses dialektis yang panjang melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Peradilan adat tersebut merupakan sebuah mekanisme yang cocok untuk dikembangkan dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat.

### **3c. Penguatan Organisasi Keagamaan dalam menyelesaikan konflik**

Agama adalah sumber kriteria baik yang paling global/universal bagi sebuah tanaman. Sementara pengalaman sehari-hari adalah sumber kriteria baik yang paling lokal/spesifik. Dan, ilmu/sains adalah sumber kriteria baik yang berupaya menemukan kesamaan dan perulangan pengalaman dari yang lokal/spesifik untuk menjadikannya pedasarana bagi sesuatu yang global/universal. Bila agama datang dan diinternalisasi dari kitab-kitab suci; sementara ilmu/sains datang dan diinternalisasi dari buku-buku disiplin ilmu; maka pengetahuan berbasis pengalaman datang dari hasil menjalani hidup dalam waktu lama, yang substansinya menjelma dalam bentuk pelajaran penting dari pengalaman, berupa butir-butir hikmah kebijaksanaan, yang kemudian lazim disebut sebagai kearifan lokal.

Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (*ta'awun*) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Dengan kerjasama dan tolong menolong tersebut diharapkan manusia bisa hidup rukun dan damai dengan sesamanya.

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna "baik" dan "damai". Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan "kesatuan hati" dan "bersepakat" untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran (Depdikbud, 1985:850) Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka "kerukunan" adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia.

Kerukunan dalam Islam diberi istilah "*tasamuh*" atau toleransi. Sehingga yang di maksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang agidah Islamiyah (keimanan), karena agidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Dalam bidang agidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang diamutnya sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al Kafirun (109) ayat 1-6.

Oleh karena itu, organisasi keagamaan selayaknya memegang peran dalam upaya mediasi konflik dengan idealism agama yang diusung yaitu '*ta'muruha bil ma'ruf wa tanhama an murkar*', serta menjembatani perbedaan pemahaman antar masyarakat pada tingkat nasional maupun local, karena "perbedaan agama, etnis, budaya, dan peradaban bukan menjadi alasan untuk tidak hidup dalam kerukunan dan perdamaian," Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, ketika berbicara dalam forum *World Interfaith Week Harmony, di Markas Besar PBB, New York*,

"Islam mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan berbagai bangsa dan suku bangsa agar umat manusia terus meningkatkan saling memahami, saling menghormati dan bekerjasama. Oleh karena itu, membesar-besarkan perbedaan untuk menimbulkan konflik sangat bertentangan dengan kodrat ilahi."

Din mengingatkan, tugas utama manusia adalah memastikan bahwa agama terus menjadi basis perdamaian, dan agama tidak akan disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah upaya untuk menekankan mediasi melalui dialog maupun kerjasama antar umat beragama sebagai instrumen untuk menjembatani perbedaan dan konflik peradaban pada seluruh tingkatan masyarakat. Dia meyakini bahwa dialog akan mengatasi saling curiga yang bersumber dari ketidakpahaman dan kurangnya rasa saling menghormati. Namun semua itu, hanya bisa dilakukan jika memiliki wadah yaitu organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang terbesar di bangsa ini.

Keberadaan ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) semakin penting karena kerap menjadi tempat dalam membantu penyelesaian berbagai konflik agama di Indonesia ketimbang peran lembaga pemerintah.

Dalam pandangan NU, sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan sehingga tak heran jika organisasi yang didirikan KH. Hasyim Asyari ini, menjadi pelindung bagi kaum minoritas.

"Islam khususnya NU sangat menghargai kemanusiaan sehingga selama ini kerap dianggap sebagai ormas yang selalu melindungi kaum minoritas," kata Wakil Menteri Agama RI Prof. KH. Nazarudin Umar di sela kegiatannya di Bali, Jumat (9/3/2012). Menurutnya, adalah wajar jika NU melindungi kaum minoritas, sebab ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini menerapkan aturan agama Islam tidak kaku atau saklek terhadap hal-hal normatif.

Fakta lain yang ditunjukkannya semasa menjabat Dirjen Bimmas Islam, Nazarudin kerap menengahi berbagai konflik keagamaan di masyarakat. "Beberapa konflik keagamaan malah lebih banyak diselesaikan di kantor NU di Jalan Kramat Raya di Jakarta dibandingkan di kantor pemerintah khususnya Departemen Agama,"

Sementara Muhammadiyah ini merupakan organisasi keagamaan, namun dalam pergerakannya organisasi dapat berubah menjadi organisasi sosial politik masyarakat di saat organisasi ini mampu menampung aspirasi umat Islam serta mampu meminimalisir

problematika yang dihadapi Umat Islam tanpa berdasar ras, suku, bangsa atau yang lainnya serta sepanjang tidak bertentangan dengan alQur'an dan hadis.

Dewasa ini eksistensi Muhammadiyah di dunia internasional semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah dengan ditunjuknya Muhammadiyah sebagai anggota *International Contact Group* (ICG) untuk menyelesaikan konflik *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dengan pemerintah Filipina. Hal ini merupakan prestasi tersendiri dalam keterlibatannya menyelesaikan konflik.

### G. Kesimpulan

Nilai kearifan lokal (*local genius/local wisdom*) akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial, lebih-lebih lagi dalam menyikapi berbagai perbedaan yang rentan menimbulkan konflik. Keberadaan nilai kearifan lokal justru akan diuji diengah-tengah kehidupan sosial yang dinamis. Di situlah sebuah nilai akan dapat dirasakan. Secara empiris nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Bali telah teruji keampuhannya, paling tidak ketika proses reformasi berlangsung, pemilu multi partai dan konflik-konflik sosial yang bernuansa antar pemuda, masalah ekonomi dan politik dapat diredam.

Mengingat peran strategis dari para tokoh agama, organisasi social keagamaan khususnya NU dan Muhammadiyah, serta langkah-langkah proaktif dari FKaub sebagai organisasi kemasyarakatan lintas agama, fibrasinya menyebar ke berbagai daerah seperti Yogyakarta, NTB, Jawa Timur dan berbagai daerah lain mulai terbentuk organisasi serupa, bahkan pada tahun 2008 pemerintah pusat melalui SKB dua menteri (Agama dan Menteri Dalam Negeri) bersepakat untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dimana pemerintah menjadi fasilitator dalam menggerakkan administrasi forum dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

Langkah selanjutnya para pemuka agama secara simultan melakukan sosialisasi ke setiap kabupaten melalui organisasinya masing-masing, memberikan pencerahan akan arti pentingnya kerukunan intern dan antar umat beragama diengah hangar bingarnya euforia reformasi. Begitupun pentingnya pengetahuan dan pemahaman politik kewarganegaraan bagi umat beragama sehingga tidak terseret pada pragmatisme politik sempit yang lazim memanfaatkan solidaritas agama ke kancah politik praktis. Hasilnya, pemilu yang awalnya diprediksi akan berlangsung panas, diwarnai konflik dan berdarah-darah, namun dapat berjalan aman, damai dan demokratis. Dengan mengusung semangat "*masyarakat malagbi*" kerukunan dapat terjaga dalam suasana perbedaan pilihan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amien, M.A., 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Barnett, R., and J. Cavanagh, 1996. "Electronic Money and the Casino Economy", in J. Mander and E. Goldsmith (eds.), *The Case Against The Global Economy and For a Turn Toward The Local*. San Fransisco: Sierra Club Books.
- Baudrillard, J., 1987. *The Ecstasy of Communication*. New York: Semiotex(e)
- Baudrillard, J., 1987. *Simulations*. New York: Semiotex(e).
- Berger, P dan Luhmann, T., 1988. *Konstruksi Sosial atas Realitas* (Terjemahan). Jakarta: LP3ES
- Colletta, N.J. dan M.I. Cullen, 2000. *Violent Conflict and the Transformation of Social Capital*. Washington D.C.: The World Bank.
- Edgerton, R.B., 2006. "Kepercayaan dan Praktik Tradisional-Apakah Sebagian Lebih Baik daripada yang Lainnya?", dalam L.E. Harrison dan S.P. Huntington (Eds.), *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Jakarta:LP3ES.
- Ibrahim, A., 2003. *Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*. Makassar: Lephass.
- Ibrahim, A., 2009. "Sastra Paseng", dalam [www.alwyrachman.blogspot.com](http://www.alwyrachman.blogspot.com). Diakses Juli 2010.
- Field, J. 2010. *Modal Sosial* (Terjemahan). Bantul: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, F., 2002. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Yogyakarta: Qalam Press.
- Khoilk, Abd., "Mengagas Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (local wisdom) (Studi pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Selupu Lebong, Bengkulu)", [http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalanan/artikel-sosial-budaya/diakses 28 Juli 2010](http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalanan/artikel-sosial-budaya/diakses%2028%20Juli%202010).
- Lawalata, J., 2004. "Fakta Tak Terlihat: Posisi Perempuan dalam Konflik Sosial di Maluku". *Jurnal Perempuan*, No.33.
- Lawang, R.M.Z., 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Lintong, E.E., 2005. "Resolusi Konflik Pertambangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara", *Wacana* (Jurnal Ilmu Sosial Transformatif), Edisi 20, Tahun VI. Yogyakarta: Insist.
- Lyotard, J. F., 1994. *Economy Libidinale*. New York: Alhnone Press.
- Lyotard, J.F., 2009. *Kondisi Postmodernisme: Suatu Laporan untuk Pengetahuan* (Terjemahan). Yogyakarta: Selasar Publishing.

- McNeely, I.F. dan L. Wolverson, 2010. *Para Penjaga Ilmu dari Alexandria sampai Internet*. Jakarta: Literati.
- Nasrum, M., 1994. *Persepsi Masyarakat Kajang terhadap Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup* (Skripsi). Makassar: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unhas.
- Nathan, M., 2004. "Decentralization and Konflik: A Case-Study of Luwu, South Sulawesi, dalam Nugroho, Dirdjosanyoto dan Kana (Eds.), *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Percik-Pustaka Pelajar.
- Nugroho, F., P. Dirdjosanyoto dan N.L. Kana, 2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Percik-Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, C., 2006. "Membaca Dinamika Konflik Poso: Dari Kekerasan Komunal ke Kekerasan Politik", *Masyarakat Indonesia* (Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia), Jilid XXXII, No.2. Jakarta: LIPI
- Pandjaitan, E., 2003. "Tapasadama Rohanta Menutup Indorayon: Kisah Perjuangan Rakyat Toba Samosir Sumatera Utara melawan PT Inti Indorayon Utama", dalam N. Kusuma dan F.Agustina (Eds.), *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Insist.
- Piliang, Y.M., 1998. *Sebuah Dunia yang Dilipat*. Bandung: Mizan.
- Ridwan, N.A., 2007. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", *Ibda'*, Vol.5, No.1. Purwokerto: P3M STAIN.
- Rozaki, Abd., "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal", <http://www.ireyogya.org/adat/flamme-adat-vol1-gagas-.htm>, diakses 28 Juli 2010.
- The World Bank, 1998. *Post Conflict Reconstruction: The Role of the World Bank*. Washington D.C.: The World Bank